

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR-187/KN/2022

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN LINGKUP/WILAYAH KERJA PADA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah dicabut dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor-4/KN/2022 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan perubahan fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka perlu melakukan penyesuaian pembagian tugas dan lingkup/wilayah kerja pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN LINGKUP/WILAYAH KERJA PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

PERTAMA : Menetapkan pembagian tugas dan lingkup/wilayah kerja pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pembagian tugas dan lingkup/wilayah kerja pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi:

- a. Pembagian lingkup/wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten;
- b. Pembagian lingkup/wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta; dan
- c. Pembagian tugas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten;

- KETIGA : Pembagian lingkup/wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten sebagaimana dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Pembagian lingkup/wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pembagian tugas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. permohonan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang diterima oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh kantor/unit yang menerima permohonan tersebut;
 - b. permohonan/penugasan penilaian atau analisis terpisah di bidang penilaian yang telah diterima oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal

ini, namun belum diterbitkan surat tugas kepada Penilai Pemerintah/Tim Penilai Pemerintah untuk melaksanakan penilaian atau analisis data, diteruskan penyelesaiannya kepada unit kerja yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini;

c. pengurusan piutang negara yang diterima oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal ini:

1. dalam hal belum diterbitkan SP3N, penyelesaian pengurusan piutang negara dilakukan oleh kantor/unit yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini setelah ada serah terima dokumen (BKPN) dan pemberitahuan kepada Penyerah Piutang dari kantor/unit yang menerima permohonan tersebut;

2. dalam hal telah diterbitkan SP3N, produk hukum yang dikeluarkan oleh kantor/unit yang menerima permohonan tersebut tetap berlaku dan tahapan penyelesaian pengurusan piutang negara berikutnya dilakukan oleh kantor/unit yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini setelah ada serah terima dokumen (BKPN) serta pemberitahuan kepada Penyerah Piutang dari kantor/unit yang menerima permohonan tersebut.

d. permohonan lelang yang diterima oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal ini, dan telah diterbitkan penetapan jadwal lelangnya, pelaksanaan lelangnya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pelelang yang berkedudukan pada kantor yang menerima permohonan tersebut dan Minuta Risalah tetap disimpan pada Kantor yang melaksanakan lelang; dan

e. penanganan perkara yang ditangani oleh kantor/unit sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal ini, proses penanganan perkaranya dilaksanakan dan diselesaikan oleh kantor/unit yang menangani perkara tersebut.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur;
3. Para Tenaga Pengkaji;
4. Para Kepala Kantor Wilayah; dan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.

di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara,
Rumah Tangga, dan Tata Usaha



Moh. Arif Rochman

- 1 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR-187/KN/2022
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN
LINGKUP/WILAYAH KERJA PADA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

**PEMBAGIAN LINGKUP/WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN**

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
1.	KPKNL TANGERANG I	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga Negara/ Badan atau Komisi di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3) Kementerian Agama 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 6) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 7) Kementerian Dalam Negeri 8) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> 10) Kementerian Kelautan dan Perikanan 11) Kementerian Ketenagakerjaan 12) Kementerian Komunikasi dan Informatika 13) Kementerian Perhubungan 14) Kementerian Luar Negeri 15) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 16) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 17) Kementerian Pertahanan 18) Kementerian Sekretariat Negara 19) Kejaksaan Republik Indonesia 20) Tentara Nasional Indonesia 21) Sekretariat Kabinet 22) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 23) Badan Keamanan Laut 24) Badan Kepegawaian Negara 25) Badan Narkotika Nasional 26) Badan Nasional Penanggulangan Bencana 27) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 28) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>29) Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>30) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p> <p>31) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>32) Badan Standardisasi Nasional</p> <p>33) Lembaga Administrasi Negara</p> <p>34) Lembaga Ketahanan Nasional</p> <p>35) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</p> <p>36) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</p> <p>37) Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>38) Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>39) Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>40) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</p> <p>41) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p>
			<p>B. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:</p> <p>1) Barang Gratifikasi</p> <p>2) Aset lain-lain</p> <p>3) Hak atas bumi, air, dan tata ruang angkasa</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				4) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT) 5) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) 6) Barang Rampasan Negara Kejaksaan 7) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi
			C.	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
		Pelayanan Penilaian	A.	Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas: 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk barang milik negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang I 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Tangerang I 3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<p>Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tangerang I yang berdomisili di luar wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan</p> <p>4) Permohonan penilaian untuk benda sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tangerang I</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>B. Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya 7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara.

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	A.	<p>Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang berasal dari Penyerah Piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4) Kementerian Agama 5) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 6) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 7) Kementerian Dalam Negeri 8) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 10) Kementerian Kelautan dan Perikanan 11) Kementerian Ketenagakerjaan 12) Kementerian Komunikasi dan Informatika 13) Kementerian Perhubungan 14) Kementerian Luar Negeri 15) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>16) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>17) Kementerian Pertahanan</p> <p>18) Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>19) Kejaksaan Republik Indonesia</p> <p>20) Tentara Nasional Indonesia</p> <p>21) Sekretariat Kabinet</p> <p>22) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia</p> <p>23) Badan Keamanan Laut</p> <p>24) Badan Kepegawaian Negara</p> <p>25) Badan Narkotika Nasional</p> <p>26) Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p> <p>27) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>28) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia</p> <p>29) Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>30) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p> <p>31) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>32) Badan Standardisasi Nasional</p> <p>33) Lembaga Administrasi Negara</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>34) Lembaga Ketahanan Nasional</p> <p>35) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</p> <p>36) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</p> <p>37) Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>38) Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>39) Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>40) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</p> <p>41) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>42) Badan Hukum Lainnya Milik Negara</p> <p>43) Aset kredit eks BPPN yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Dagang Nasional Indonesia - Bank Pelita Indonesia - Bank Istimarat - Bank Deka - Bank Centris - Bank Central Asia - Bank Tiara Asia - Bank Duta - Bank Tamara - Bank Nusa Nasional - Bank Rama - Bank Asia Pacific - Bank Aken - Bank Umum Servitia - Bank Intan - Bank Alfa - Bank Sino - Bank Kharisma - Bank Arya Panduarta

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> - Bank Dewa Rutji - Bank Uppindo - Bank Hastin International - Bank Metropolitan - Bank Lautan Berlian - Bank Bahari - Bank Dagang dan Industri - Bank Bapede Indonesia - Bank Indotrade - Bank Putera Multikarsa - Bank Ratu - Bank Prasidha Utama - Bank Unibank - Bank Papan Sejahtera - Bank Modern - Bank Ficorinvest - Bank International Indonesia - Bank Lippo - Bank Rakyat Indonesia - Bank Sembada Artha Nugroho - Bank Umum Koperasi Indonesia - Bank Artamedia <p>44) DJKN [aset kredit eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)]</p> <p>45) Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan</p> <p>46) Kementerian Negara/Lembaga Negara/Badan atau Komisi Lainnya</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
		Pelayanan Lelang	A.	<p>Objek lelang yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Tangerang I 2) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a) PT. Bank Negara Indonesia b) PT. Bank Rakyat Indonesia c) PT. Bank CIMB Niaga d) PT. Bank CIMB Niaga Syariah e) PT. Bank Pan Indonesia f) PT. Bank Pan Indonesia Syariah g) PT. Bank Permata h) PT. Bank Permata Syariah i) PT. Bank OCBC NISP j) PT. Bank OCBC NISP Syariah k) PT. Bank Panin Dubai Syariah l) Koperasi Simpan Pinjam m) Koperasi Simpan Pinjam Syariah n) Lembaga Pembiayaan o) Perorangan 3) Eksekusi Jaminan Fidusia atas permohonan Kreditur sebagaimana tercantum dalam angka 2 4) Barang Rampasan Negara Kejaksaan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			5) Eksekusi gadai 6) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi 7) Kementerian Negara/Lembaga Negara, Badan Layanan Umum, dan Pemohon Lelang Lainnya yang termasuk dalam pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tangerang I 8) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Lainnya Milik Negara 9) Barang gratifikasi 10) Bank Indonesia 11) Balai Lelang 12) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam 13) Sukarela domisili Pemohon di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
2.	KPKNL TANGERANG II	Pengelolaan Kekayaan Negara	A. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga Negara/Badan atau Komisi di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi: 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3) Kementerian Kesehatan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> 4) Kementerian Keuangan 5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 6) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10) Kementerian Pemuda dan Olahraga 11) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 12) Kementerian Perdagangan 13) Kementerian Perindustrian 14) Kementerian Pertanian 15) Kementerian Sosial 16) Kepolisian Negara Republik Indonesia 17) Mahkamah Agung 18) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 19) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 20) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 21) Badan Informasi Geospasial 22) Badan Intelijen Negara

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>23) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</p> <p>24) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>25) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika</p> <p>26) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</p> <p>27) Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>28) Badan Pengawas Tenaga Nuklir</p> <p>29) Badan Pusat Statistik</p> <p>30) Badan Siber dan Sandi Negara</p> <p>31) Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>32) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>33) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</p> <p>34) Komisi Pengawas Persaingan Usaha</p> <p>35) Komisi Yudisial</p> <p>36) Komisi Pemilihan Umum</p> <p>37) Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>38) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</p> <p>39) Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>40) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
			B.	<p>Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai BMN 2) Hak atas kekayaan intelektual 3) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi 4) Aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional 5) Aset eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset 6) Aset Eks. Kepabeanan dan Cukai
			C.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Tangerang</p>
		Pelayanan Penilaian	A.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Tangerang I 2) Permohonan penilaian dalam rangka

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<p>pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja</p> <p>pengurusan piutang negara KPKNL Tangerang I</p> <p>3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tangerang I yang berdomisili di luar wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan</p> <p>4) Permohonan penilaian untuk benda sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tangerang II</p>
			B.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <p>1) Sumber Daya Alam</p> <p>2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan</p> <p>3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara</p> <p>4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya 7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	A.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang berasal dari Penyerah Piutang: 1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3) Kementerian Kesehatan 4) Kementerian Keuangan 5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 6) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> 10) Kementerian Pemuda dan Olahraga 11) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 12) Kementerian Perdagangan 13) Kementerian Perindustrian 14) Kementerian Pertanian 15) Kementerian Sosial 16) Kepolisian Negara Republik Indonesia 17) Mahkamah Agung 18) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 19) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 20) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 21) Badan Informasi Geospasial 22) Badan Intelijen Negara 23) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 24) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 25) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 26) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 27) Badan Pengawas Obat dan Makanan 28) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 29) Badan Pusat Statistik

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>30) Badan Siber dan Sandi Negara</p> <p>31) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>32) Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>33) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</p> <p>34) Komisi Pengawas Persaingan Usaha</p> <p>35) Komisi Yudisial</p> <p>36) Komisi Pemilihan Umum</p> <p>37) Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>38) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</p> <p>39) Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>40) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>41) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>42) Aset kredit eks BPPN yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Surya - Bank Hokindo - Bank Subentra - Bank Umum Nasional - Bank Danamon Indonesia - Bank Bali - Bank Risjad Salim Internasional - Bank PDFCI - Bank Niaga - Bank Pos Nusantara - Bank Sewu International - Bank Sanho - Bank Dharmala - Bank Ciputra

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia Raya - Bank Danahutama - Bank Central Dagang - Bank Budi International - Bank Orient - Bank Sahid Gajah Perkasa - Bank Dana Asia - Bank Yakin Makmur - Bank Namura Internusa - Bank Tata - Bank Pesona Kridayana - Bank Putra Surya Perkasa - Bank Mashill Utama - Bank Baja International - Bank Bumi Raya Utama - Bank Bumi Daya - Bank Dagang Negara - Bank Ekspor Impor Indonesia - Bank Pembangunan Indonesia - Bank Negara Indonesia - Bank Tabungan Negara - Bank Mandiri - Bank Universal - Jaya Bank International - Bank Perniagaan Umum - Bank Pertiwi - Bank Overseas Express - Bank Permata - Bank Prima Ekspres <p>43) DJKN (aset kredit eks. Bank Dalam Likuidasi)</p> <p>44) Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemeritah Daerah lainnya</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
		Pelayanan Lelang	A.	<p>Objek lelang yang berada di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Tangerang II 2) Sita Pengadilan 3) Sita Pajak 4) Harta Pailit/Kurator 5) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a) PT. Bank Tabungan Negara b) PT. Bank Tabungan Negara Syariah c) PT. Bank Mandiri d) PT. Bank Syariah Indonesia e) PT. Bank Mega f) PT. Bank Mega Syariah g) PT. Bank Central Asia h) PT. Bank Central Asia Syariah i) PT. Bank Danamon Indonesia j) PT. Bank Danamon Indonesia Syariah k) Bank Pembangunan Daerah l) Bank Pembangunan Daerah Syariah m) Bank Perkreditan Rakyat n) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>o) Pemegang Hak Tanggungan Pertama lainnya yang tidak termasuk lingkup/wilayah kerja KPKNL Tangerang I</p> <p>6) Eksekusi Jaminan Fidusia atas permohonan Kreditur sebagaimana tercantum dalam angka 5</p> <p>7) Sitaan Kepolisian</p> <p>8) Sitaan Polisi Air/Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>9) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang dikuasai negara eks. kepabeanan dan cukai</p> <p>10) Kementerian Negara/Lembaga Negara, Badan Layanan Umum, dan Pemohon Lelang Lainnya yang termasuk dalam pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tangerang II</p> <p>11) Balai Harta Peninggalan</p> <p>12) Sukarela domisili Pemohon di Kabupaten Tangerang</p> <p>13) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				14) Lelang Eksekusi/Non eksekusi wajib lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR-187/KN/2022
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN
LINGKUP/WILAYAH KERJA PADA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

PEMBAGIAN LINGKUP/WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
1.	KPKNL JAKARTA I	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/ Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia3) Mahkamah Agung4) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian5) Kementerian Luar Negeri6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi7) Kementerian Perhubungan8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional9) Kementerian Pemuda dan Olahraga

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>10) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</p> <p>11) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>12) Badan Narkotika Nasional</p> <p>13) Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>14) Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>15) Komisi Pemilihan Umum</p> <p>16) Ombudsman Republik Indonesia</p>
			<p>B. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <p>1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat</p> <p>2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Pusat</p> <p>3) Hak atas kekayaan intelektual</p> <p>4) Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai BMN</p> <p>5) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi</p>
			<p>C. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Pusat</p>
		Pelayanan Penilaian	<p>A. Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta I 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta I 3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta I yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta
			<p>B. Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none">4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah6) Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara8) Sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	<p>A. Pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3) Kementerian Sekretariat Negara 4) Kementerian Luar Negeri 5) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 6) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 7) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 8) Badan Intelijen Negara 9) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 10) Badan Pusat Statistik 11) Badan Standardisasi Nasional 12) Badan Siber dan Sandi Negara 13) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 14) Komisi Pemilihan Umum 15) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 16) Lembaga Administrasi Negara 17) Badan Riset dan Inovasi Nasional

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>18) Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>19) DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) eks.penanganan Kejaksaan)</p> <p>20) Aset kredit eks BPPN yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Surya - Bank Hokindo - Bank Subentra - Bank Umum Nasional - Bank Danamon Indonesia - Bank Bali - Bank Risjad Salim Internasional - Bank PDFCI - Bank Niaga - Bank Pos Nusantara - Bank Sewu International - Bank Sanho - Bank Dharmala - Bank Ciputra - Bank Indonesia Raya - Bank Danahutama - Bank Central Dagang - Bank Budi International - Bank Orient - Bank Sahid Gajah Perkasa - Bank Dana Asia - Bank Yakin Makmur - Bank Namura Internusa - Bank Tata - Bank Pesona Kridayana - Bank Putra Surya Perkasa

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<ul style="list-style-type: none"> - Bank Mashill Utama - Bank Baja International - Bank Bumi Raya Utama - Bank Bumi Daya - Bank Dagang Negara - Bank Ekspor Impor Indonesia - Bank Pembangunan Indonesia - Bank Negara Indonesia - Bank Tabungan Negara - Bank Mandiri - Bank Universal - Bank Jaya International - Bank Perniagaan Umum - Bank Pertiwi - Bank Overseas Express - Bank Permata - Bank Prima Ekspres <p>21) Pemda DKI Jakarta</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
		Pelayanan Lelang	<p>A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta I 2) Balai Lelang 3) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 4) Eksekusi Pajak Lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat 5) Eksekusi Pajak Lingkup Kanwil DJP WP Besar 6) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Jakarta Pusat 7) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a) PT. Bank Mandiri b) PT. Bank Syariah Indonesia c) Standard Chartered Bank d) Bank Perkreditan Rakyat e) Bank Perkreditan Rakyat Syariah f) PT. Bank OCBC NISP 8) Eksekusi Jaminan Fidusia domisili Kreditur di Jakarta Pusat 9) Kementerian/Lembaga Negara, Badan Layanan Umum, dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta I

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> 10) Aset Bank Indonesia 11) Pemerintah Daerah domisili di Jakarta Pusat 12) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Jakarta Pusat 13) Balai Harta Peninggalan 14) Sukarela domisili Pemohon di Jakarta Pusat 15) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi domisili di Jakarta Pusat 16) Aset eks. BPPN/PT. PPA domisili di Jakarta Pusat 17) Aset eks. settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Pusat 18) Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
2.	KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3) Kementerian Sekretariat Negara 4) Kementerian Keuangan 5) Kementerian Kesehatan 6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7) Kementerian Pertanian 8) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan 10) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 11) Sekretariat Kabinet 12) Kejaksaan Republik Indonesia 13) Badan Informasi Geospasial 14) Badan Nasional Penanggulangan Bencana 15) Komisi Yudisial 16) Lembaga Administrasi Negara 17) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
			B.	<p>Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara 2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Utara 3) Aset eks. Kepabeanan dan Cukai 4) Benda BerhargaAsal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)
			C.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu</p>
		Pelayanan Penilaian	A.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta II 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/ wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta II

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta II yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta</p>
			<p>B. Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya 7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				perundang-undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurāt Militer dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	A.	<p>Pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5) Kementerian Ketenagakerjaan 6) Kementerian Kelautan dan Perikanan 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga 9) Sekretariat Kabinet 10) Arsip Nasional Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</p> <p>12) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam</p> <p>13) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang</p> <p>14) Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>15) Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>16) Komisi Yudisial</p> <p>17) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>18) DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) eks. penanganan Kepolisian]</p> <p>19) Aset kredit eks BPPN yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) - Bank Pelita Indonesia - Bank Istimarat - Bank Deka - Bank Centris - Bank Central Asia (BCA) - Bank Tiara Asia - Bank Duta - Bank Tamara - Bank Nusa Nasional (BNN) - Bank Rama - Bank Asia Pasific - Bank Aken - Bank Umum Servitia

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<ul style="list-style-type: none"> - Bank Intan - Bank Alfa - Bank Sino - Bank Kharisma - Bank Arya Panduarta - Bank Dewa Rutji - Bank Uppindo - Bank Hastin International - Bank Metropolitan - Bank Lautan Berlian - Bank Bahari - Bank Dagang dan Industri - Bank Bapede Indonesia - Bank Indotrade - Bank Putera Multikarsa - Bank Ratu - Bank Prasadha Utama - Bank Unibank - Bank Papan Sejahtera - Bank Modern - Bank Ficorinvest - Bank International Indonesia - Bank Lippo - Bank Rakyat Indonesia - Bank Sembada Arta Nugroho - Bank Umum Koperasi Indonesia - Bank Artamedia - Bank Patriot
		Pelayanan Lelang	A.	<p>Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ekskusi PUPN dari KPKNL Jakarta II 2) Balai Lelang 3) Pengadilan Negeri/Pengadilan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Utara</p> <p>4) Eksekusi Pajak lingkup Kanwil DJP Jakarta Utara</p> <p>5) Eksekusi Pajak lingkup Kanwil DJP WP Jakarta Khusus</p> <p>6) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu</p> <p>7) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur:</p> <p>a) PT. Bank Rakyat Indonesia</p> <p>b) PT. Bank Permata</p> <p>c) PT. Bank Harda</p> <p>d) PT. Bank Maybank</p> <p>e) PT. Bank Maybank Syariah</p> <p>f) PT. Bank Muamalat Indonesia</p> <p>8) Eksekusi Jaminan Fidusia domisili Kreditur di Kota Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu</p> <p>9) Barang yang dikuasai/tidak dikuasai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</p> <p>10) Kementerian/ Lembaga Negara, Badan Layanan Umum dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta II</p> <p>11) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<p>Utara dan Kab. Kepulauan Seribu</p> <p>12) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu</p> <p>13) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)</p> <p>14) Sukarela domisili Pemohon di Kota Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu</p> <p>15) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu</p> <p>16) Aset eks. BPPN/PT. PPA domisili di Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu</p> <p>17) Aset eks. settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu</p> <p>18) Sitaan/Temuan Kepolisian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>19) Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta</p>
3.	KPKNL JAKARTA III	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/ Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3) Kementerian Agama 4) Kementerian Sosial 5) Kementerian Ketenagakerjaan 6) Kementerian Perdagangan 7) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11) Badan Intelijen Negara 12) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 13) Badan Pengawas Tenaga Nuklir 14) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 15) Badan Standardisasi Nasional 16) Komisi Pemberantasan Korupsi 17) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 18) Otoritas Jasa Keuangan

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
			B.	<p>Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi 3) Barang Gratifikasi 4) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Barat 5) Aset eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
			C.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Barat</p>
		Pelayanan Penilaian	A.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta III 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/ wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta III 3) Permohonan penilaian dan analisis yang

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta III yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta
			B.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Barat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara 4) Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya 7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kejaksaan,

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	A.	<p>Pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 4) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 5) Kementerian Dalam Negeri 6) Kementerian Perindustrian 7) Kementerian Perdagangan 8) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<p>Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <p>11) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional</p> <p>12) Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p> <p>13) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>14) Badan Pengawas Obat Dan Makanan</p> <p>15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</p> <p>16) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</p> <p>17) Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>18) DJKN [aset kredit eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)]</p> <p>19) Rumah Sakit dalam lingkup tugas Kementerian Kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS Persahabatan - RS Kanker Dharmas - RS Ketergantungan Obat - RSPI Prof.Dr.Sulianti S - RSJ Dr.Soeharto Heerjan <p>20) Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi Lainnya</p> <p>21) Rumah Sakit lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan</p>
		Pelayanan Lelang	A.	Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut:

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta III 2) Balai Lelang 3) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 4) Eksekusi Pajak lingkup Kanwil DJP Jakarta Barat 5) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Barat 6) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: <ol style="list-style-type: none"> a) PT. Bank Negara Indonesia b) PT. Bank Central Asia c) PT. Bank Central Asia Syariah d) PT. Bank Mega e) PT. Bank Mega Syariah f) PT. Bank Victoria g) PT. Bank Victoria Syariah 7) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 8) Sitaan Kepolisian 9) Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi 10) Barang Gratifikasi 11) Oditoriat Militer 12) Eksekusi Jaminan Fidusia domisili Kreditur di Kota Jakarta Barat 13) Kementerian/ Lembaga Negara, Badan Layanan Umum dan Pemohon Lelang lainnya yang

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				<p>termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta III</p> <p>14) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>15) Badan Usaha Milik Negara/ Daerah domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>16) Sukarela domisili Pemohon di Kota Jakarta Barat</p> <p>17) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>18) Aset eks BPPN/PT. PPA domisili di Kota Jakarta Barat</p> <p>19) Aset eks settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Barat</p> <p>20) Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta</p>
4.	KPKNL JAKARTA IV	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/ Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <p>1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>3) Kementerian Dalam Negeri</p> <p>4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			5) Kementerian Perindustrian 6) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7) Kepolisian Negara Republik Indonesia 8) Badan Kepegawaian Negara 9) Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika 10) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 11) Badan Pengawas Obat Dan Makanan 12) Badan Pusat Statistik 13) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 14) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 15) Lembaga Ketahanan Nasional 16) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 17) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			B. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Selatan 3) Aset lain-lain

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				4) Hak atas bumi, air, dan tata ruang angkasa
			C.	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Selatan
		Pelayanan Penilaian	A.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta IV 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/ wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta IV 3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta IV yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
			B.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Selatan atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara 4) Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset lembaga/badan hukum non swasta Lainnya 7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	A.	Pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>berasal dari Penyerah Piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahkamah Agung 2) Kementerian Perhubungan 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5) Badan Informasi Geospasial 6) Badan Kepegawaian Negara 7) Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika 8) Badan Narkotika Nasional 9) Badan Nasional Pengelola Perbatasan 10) Badan Pengawas Pemilihan Umum 11) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 12) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura 13) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 14) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 16) DJKN (aset kredit eks. Bank Dalam Likuidasi) 17) Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit dalam

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				lingkup tugas Kementerian Kesehatan yang meliputi: - RSUP Fatmawati - RS CiPT.o Mangunkusumo - RSJP Harapan Kita - RSAB Harapan Kita - RS Pusat Otak Nasional
		Pelayanan Lelang	A.	Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut: 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta IV 2) Balai Lelang 3) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 4) Eksekusi Pajak lingkup Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Jakarta Selatan II 5) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Selatan 6) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: a) Bank Pembangunan Daerah b) Bank Pembangunan Daerah Syariah c) PT. Bank Danamon d) PT. Bank Danamon Syariah e) PT. Bank Bukopin f) PT. Bank Syariah Bukopin g) PT. Global Superinvest

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				h) PT. Bank SBI Indonesia i) PT. Bank UOB j) HSBC 7) Eksekusi Jaminan Fidusia domisili Kreditur di Kota Jakarta Selatan 8) Kementerian/Lembaga Negara, Badan Layanan Umum dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta IV 9) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta Selatan 10) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Selatan 11) Sukarela domisili Pemohon di Kota Jakarta Selatan 12) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Selatan 13) Aset eks BPPN/PT. PPA domisili di Kota Jakarta Selatan 14) Aset eks settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Selatan 15) Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta
5.	KPKNL JAKARTA V	Pengelolaan Kekayaan Negara	A.	Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/Badan atau Komisi

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<p>di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Pertahanan 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika 3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 5) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 6) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 7) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 8) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 9) Arsip Nasional Republik Indonesia 10) Badan Nasional Pengelola Perbatasan 11) Badan Keamanan Laut 12) Badan Siber dan Sandi Negara 13) Dewan Ketahanan Nasional 14) Komisi Pengawas Persaingan Usaha 15) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 17) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
			B.	<p>Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Timur 2) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Timur 3) Aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
			C.	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Timur</p>
		Pelayanan Penilaian	A.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta V 2) Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta V 3) Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta V yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta
			B.	<p>Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Timur atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Alam 2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan 3) Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara 4) Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah 5) Aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah 6) Aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya 7) Aset Kelolaan LMAN untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat maupun Pengelolaan Kekayaan Negara 8) Sitaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Oditurat Militer dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
		Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara	A.	<p>Pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Pertahanan 2) Kementerian Agama 3) Kementerian Keuangan 4) Kementerian Sosial 5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 6) Kementerian Komunikasi dan Informatika 7) Kementerian Pertanian 8) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 10) Kejaksaan Republik Indonesia 11) Kepolisian Negara Republik Indonesia 12) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 13) Badan Keamanan Laut 14) Lembaga Ketahanan Nasional 15) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 16) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA	
				17) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 18) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 19) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 20) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 21) DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) bukan eks. Penanganan Kejaksaan dan Kepolisian, aset eks. Kelolaan BPPN, dan aset eks. Bank Dalam Likuidasi]
		Pelayanan Lelang	A.	Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas permohonan lelang sebagai berikut: 1) Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta V 2) Balai Lelang 3) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Timur 4) Eksekusi Pajak lingkup Kanwil DJP Jakarta Timur 5) Eksekusi Harta Pailit yang kuratornya berdomisili di Kota Jakarta Timur 6) Eksekusi Hak Tanggungan Kreditur: a) PT. Bank Tabungan Negara

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<ul style="list-style-type: none"> b) PT. Bank-Tabungan Negara Syariah c) Bank CIMB Niaga d) Bank CIMB Niaga Syariah e) Perorangan f) Koperasi Simpan Pinjam g) Koperasi Simpan Pinjam Syariah h) Pemegang Hak Tanggungan Pertama lainnya yang tidak termasuk lingkup/wilayah kerja KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta IV 7) Eksekusi Jaminan Fidusia domisili Kreditur di Kota Jakarta Timur 8) Kementerian/ Lembaga Negara, Badan Layanan Umum dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta V 9) Pemerintah Daerah domisili di Kota Jakarta Timur 10) Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Kota Jakarta Timur 11) Sukarela domisili Pemohon di Kota Jakarta Timur 12) Aset eks. Bank Dalam Likuidasi domisili di Kota Jakarta Timur 13) Aset eks. BPPN/PT. PPA domisili di Kota Jakarta Timur

NO.	NAMA UNIT	BIDANG	LINGKUP/WILAYAH KERJA
			<div>14) Aset eks settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) domisili Jakarta Timur</div> <div>15) Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta</div> <div>16) Pemohon lelang lainnya yang tidak termasuk lingkup/wilayah kerja KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta IV</div>

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR-187/KN/2022
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN
LINGKUP/WILAYAH KERJA PADA INSTANSI
VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
1.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I	Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup I	1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			2.	Kementerian Sekretariat Negara
			3.	Kementerian Dalam Negeri
			4.	Kementerian Keuangan
			5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
			6.	Kementerian Kesehatan
			7.	Kementerian Perindustrian
			8.	Kementerian Perdagangan
			9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			11.	Kementerian Perhubungan
			12.	Kementerian Pertanian
			13.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			14.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			15.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			16.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			17.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			18.	Sekretariat Kabinet
			19.	Badan Informasi Geospasial
			20.	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
			21.	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
			22.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
			23.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
			24.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
			25.	Badan Standardisasi Nasional
			26.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
			27.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
			28.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
		Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup I	1.	Aset dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)/Kontrak Bagi Hasil (KBH)/Kontrak Production Sharing (KPS), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) Panas Bumi
			2.	Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
			3.	Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)
			4.	Aset eks. Bank Dalam Likuidasi
			5.	Aset Lain-lain

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
		Pembinaan dan pengoordinasian pada KPKNL lingkup I	1.	Lingkup I Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan
			3.	Lingkup I Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang
			4.	Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi
			5.	Lingkup I Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6.	Lingkup I Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang
			7.	Lingkup I Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta V
			8.	Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Bekasi
			9.	Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta a) KPKNL Semarang b) KPKNL Pekalongan
			10.	Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Pamekasan
			11.	Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
				a) KPKNL Palangkaraya
			13.	Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Samarinda
			14.	Lingkup I Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Singaraja
			15.	Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Makassar
			16.	Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara a) KPKNL Manado
			17.	Lingkup I Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura
2.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II	Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup II	1.	Mahkamah Agung
			2.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			3.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
			4.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			5.	Kementerian Luar Negeri
			6.	Kementerian Agama
			7.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
			8.	Kementerian Sosial
			9.	Kementerian Ketenagakerjaan
			10.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
			12. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			13. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			14. Kejaksaan Republik Indonesia
			15. Arsip Nasional Republik Indonesia
			16. Badan Kepegawaian Negara
			17. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
			18. Badan Narkotika Nasional
			19. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
			20. Badan Pengawas Obat Dan Makanan
			21. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
			22. Badan Pusat Statistik
			23. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			24. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			25. Komisi Pemberantasan Korupsi
			26. Komisi Pemilihan Umum
			27. Komisi Yudisial
			28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			29. Ombudsman Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			30.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			31.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup II	1.	Barang Rampasan Negara
			2.	Barang Gratifikasi
			3.	Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)
			4.	Aset eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
		Pembinaan dan pengoordinasian pada KPKNL lingkup II	1.	Lingkup II Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Pematangsiantar b) KPKNL Kisaran
			3.	Lingkup II Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Bukittinggi b) KPKNL Pekanbaru
			4.	Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang
			5.	Lingkup II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung
			6.	Lingkup II Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I
			7.	Lingkup II Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta II b) KPKNL Jakarta IV

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			8.	Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bogor b) KPKNL Purwakarta
			9.	Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta a) KPKNL Surakarta b) KPKNL Tegal
			10.	Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Sidoarjo b) KPKNL Malang
			11.	Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Pangkalan BUN
			13.	Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Bontang
			14.	Lingkup II Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Kupang
			15.	Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Pare-Pare b) KPKNL Palopo
			16.	Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara a) KPKNL Palu
			17.	Lingkup II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
				a) KPKNL Sorong
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III	Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup III	1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
			2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			3.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
			4.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
			5.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
			6.	Kementerian Pertahanan
			7.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			8.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			9.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
			10.	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
			11.	Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Darat (TNI-AD)
			12.	Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Laut (TNI-AL)
			13.	Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Udara (TNI-AU)
			14.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			15.	Badan Intelijen Negara
			16.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			17.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
			18.	Badan Pengawas Pemilihan Umum

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			19.	Badan Keamanan Laut
			20.	Badan Siber dan Sandi Negara
			21.	Dewan Ketahanan Nasional
			22.	Lembaga Administrasi Negara
			23.	Lembaga Ketahanan Nasional
			24.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
			25.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
			26.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			27.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
			28.	Otoritas Jasa Keuangan
		Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup III	1.	Hak atas bumi, air, dan tata ruang angkasa
			2.	Hak atas kekayaan intelektual
			3.	Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara
			4.	Aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
		Pembinaan dan pengoordinasian pada KPKNL lingkup III	1.	Lingkup III Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Lingkup III Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Padangsidimpuan
			3.	Lingkup III Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Batam b) KPKNL Dumai

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			4.	Lingkup III Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Lahat b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Lingkup III Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Metro
			6.	Lingkup III Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang II
			7.	Lingkup III Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta III
			8.	Lingkup III Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Tasikmalaya b) KPKNL Cirebon
			9.	Lingkup III Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta a) KPKNL Yogyakarta b) KPKNL Purwokerto
			10.	Lingkup III Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Jember b) KPKNL Madiun
			11.	Lingkup III Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Lingkup III Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Lingkup III Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Tarakan
			14.	Lingkup III Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Mataram b) KPKNL Bima

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			15.	Lingkup III Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Kendari
			16.	Lingkup III Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Ternate
			17.	Lingkup III Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Biak
4.	Seksi Penilaian I	Penilaian Lingkup I (Verifikasi Permohonan Penilaian)	1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			3.	Kementerian Sekretariat Negara
			4.	Kementerian Dalam Negeri
			5.	Kementerian Keuangan
			6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
			7.	Kementerian Kesehatan
			8.	Kementerian Perindustrian
			9.	Kementerian Perdagangan
			10.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			12.	Kementerian Perhubungan
			13.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			14.	Kementerian Pertanian

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			15.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			17.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			18.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			19.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			20.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			21.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			22.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
			23.	Sekretariat Kabinet
			24.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			25.	Badan Informasi Geospasial
			26.	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
			27.	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika
			28.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
			29.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
			30.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
			31.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			Dan Pelabuhan Bebas Sabang
			32. Badan Pusat Statistik
			33. Badan Standardisasi Nasional
			34. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			35. Badan Riset dan Inovasi Nasional
			36. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
			37. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
			38. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
			39. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
			40. Aset dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)/Kontrak Bagi Hasil (KBH)/Kontrak Production Sharing (KPS), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) Panas Bumi
			41. Aset eks. Kepabeanan dan Cukai
			42. Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)
			43. Aset eks. Bank Dalam Likuidasi
			44. Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara
			45. Aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
			46. Penilaian atas Permohonan Pihak Lain

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
		Pembinaan dan pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I (Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Supervisi, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan dan Laporan Penilaian, Penyusunan dan Pengolahan Basis Data, Pembinaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Penilai)	1.	Lingkup I Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan b) KPKNL Pematangsiantar
			3.	Lingkup I Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Pekanbaru b) KPKNL Dumai
			4.	Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang b) KPKNL Lahat
			5.	Lingkup I Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung b) KPKNL Metro
			6.	Lingkup I Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang
			7.	Lingkup I Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta V
			8.	Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Tasikmalaya c) KPKNL Cirebon
			9.	Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta a) KPKNL Semarang b) KPKNL Surakarta c) KPKNL Pekalongan
			10.	Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Pamekasan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
				c) KPKNL Madiun
			11.	Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Samarinda
			14.	Lingkup I Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Kupang
			15.	Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Makassar b) KPKNL Palopo
			16.	Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado b) KPKNL Ternate
			17.	Lingkup I Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura b) KPKNL Biak
5.	Seksi Penilaian II	Penilaian Lingkup II (Verifikasi Permohonan Penilaian)	1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
			2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			3.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
			4.	Mahkamah Agung
			5.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			6.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
			7.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
			8.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
			9.	Kementerian Luar Negeri
			10.	Kementerian Pertahanan
			11.	Kementerian Agama
			12.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
			13.	Kementerian Sosial
			14.	Kementerian Ketenagakerjaan
			15.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			16.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
			17.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			18.	Kejaksaan Republik Indonesia
			19.	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
			20.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD)
			21.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL)
			22.	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU)
			23.	Arsip Nasional Republik Indonesia
			24.	Badan Intelijen Negara

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			25.	Badan Kepegawaian Negara
			26.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
			27.	Badan Narkotika Nasional
			28.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			29.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
			30.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
			31.	Badan Pengawas Obat Dan Makanan
			32.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
			33.	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
			34.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			35.	Badan Keamanan Laut
			36.	Badan Siber dan Sandi Negara
			37.	Dewan Ketahanan Nasional
			38.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			39.	Komisi Pemberantasan Korupsi
			40.	Komisi Pemilihan Umum
			41.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
			42.	Komisi Yudisial
			43.	Lembaga Administrasi Negara
			44.	Lembaga Ketahanan Nasional
			45.	Ombudsman Republik Indonesia

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			46.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			47.	Otoritas Jasa Keuangan
			48.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			49.	Barang Rampasan Negara
			50.	Barang Gratifikasi
			51.	Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)
			52.	Aset eks. Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
			53.	Hak atas bumi, air, dan tata ruang angkasa
			54.	Hak atas kekayaan intelektual
			55.	Penilaian atas Permohonan Pihak Lain
		Pembinaan dan pengoordinasian pada KPKNL Lingkup II (Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Supervisi, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan dan Laporan Penilaian, Penyusunan dan Pengolahan Basis Data, Pembinaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Penilai)	1.	Lingkup II Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Kisaran b) KPKNL Padangsidimpuan
			3.	Lingkup II Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang b) KPKNL Bukittinggi c) KPKNL Batam
			4.	Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Lingkup II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			6.	Lingkup II Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I b) KPKNL Tangerang II
			7.	Lingkup II Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta II b) KPKNL Jakarta III c) KPKNL Jakarta IV
			8.	Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bekasi b) KPKNL Bogor c) KPKNL Purwakarta
			9.	Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta a) KPKNL Tegal b) KPKNL Yogyakarta c) KPKNL Purwokerto
			10.	Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Sidoarjo b) KPKNL Malang c) KPKNL Jember
			11.	Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya b) KPKNL Pangkalan BUN
			13.	Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Tarakan b) KPKNL Bontang
			14.	Lingkup II Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Singaraja b) KPKNL Mataram

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
				c) KPKNL Bima
			15.	Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Pare-Pare c) KPKNL Kendari
			16.	Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Palu
			17.	Lingkup II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Sorong
6.	Seksi Piutang Negara I	Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup I	1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
			3.	Kementerian Sekretariat Negara
			4.	Kementerian Dalam Negeri
			5.	Kementerian Keuangan
			6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			7.	Kementerian Kesehatan
			8.	Kementerian Perindustrian
			9.	Kementerian Perdagangan
			10.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			12.	Kementerian Perhubungan
			13.	Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			14.	Kementerian Pertanian
			15.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			17.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			18.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			19.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			20.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			21.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			22.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
			23.	Sekretariat Kabinet
			24.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			25.	Badan Informasi Geospasial
			26.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
			27.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
			28.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
			29.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
			30.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
			31.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
				Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
			32.	Badan Pusat Statistik
			33.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			34.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			35.	Lembaga Penyiaran Publiik Radio Republik Indonesia
			36.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
			37.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
			38.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			39.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
			40.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			41.	DJKN Eks BPPN
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I	1.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara lingkup I Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh
			2.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan b) KPKNL Kisaran
			3.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Bukittinggi b) KPKNL Dumai

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			4.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang b) KPKNL Lahat
			5.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I
			7.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta II b) KPKNL Jakarta IV
			8.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bogor b) KPKNL Tasikmalaya c) KPKNL Cirebon
			9.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY a) KPKNL Pekalongan b) KPKNL Yogyakarta c) KPKNL Purwokerto

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			10. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Jember c) KPKNL Pamekasan
			11. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya b) KPKNL Pangkalan Bun
			13. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Samarinda b) KPKNL Bontang
			14. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Mataram b) KPKNL Kupang
			15. Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Makassar

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			16.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado b) KPKNL Ternate
			17.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup I Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Biak
7.	Seksi Piutang Negara II	Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup II	1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
			2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			3.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
			4.	Mahkamah Agung
			5.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
			6.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
			7.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
			8.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
			9.	Kementerian Luar Negeri
			10.	Kementerian Pertahanan
			11.	Kementerian Agama
			12.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
			13.	Kementerian Sosial
			14.	Kementerian Ketenagakerjaan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
			17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			18. Kejaksaan Republik Indonesia
			19. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
			20. Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat
			21. Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut
			22. Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara
			23. Arsip Nasional Republik Indonesia
			24. Badan Intelijen Negara
			25. Badan Kepegawaian Negara
			26. Badan Koordinasi Penanaman Modal
			27. Badan Narkotika Nasional
			28. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			29. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
			30. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
			31. Badan Pengawas Obat dan Makanan
			32. Badan Pengawas Pemilihan Umum
			33. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
			34. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			35.	Badan Keamanan Laut
			36.	Badan Siber dan Sandi Negara
			37.	Dewan Ketahanan Nasional
			38.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			39.	Komisi Pemberantasan Korupsi
			40.	Komisi Pemilihan Umum
			41.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
			42.	Komisi Yudisial
			43.	Lembaga Administrasi Negara
			44.	Lembaga Ketahanan Nasional
			45.	Ombudsman Republik Indonesia
			46.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
			47.	Otoritas Jasa Keuangan
			48.	DJKN Eks BDL
			49.	DJKN Eks PPA
		Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup II	1.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Pematangsiantar b) KPKNL Padangsidimpuan

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			3.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang b) KPKNL Pekanbaru c) KPKNL Batam
			4.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung b) KPKNL Metro
			6.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang b) KPKNL Tangerang II
			7.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta III c) KPKNL Jakarta V
			8.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Bekasi c) KPKNL Purwakarta

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			9.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY a) KPKNL Semarang b) KPKNL Surakarta c) KPKNL Tegal
			10.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Sidoarjo b) KPKNL Malang c) KPKNL Madiun
			11.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Tarakan
			14.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Singaraja c) KPKNL Bima

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			15.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Pare-Pare c) KPKNL Palopo d) KPKNL Kendari
			16.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Palu
			17.	Pengurusan dan Pengelolaan Piutang Negara Lingkup II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura b) KPKNL Sorong
8.	Seksi Bimbingan Lelang I	Pembinaan dan Pengoordinasian pada KPKNL Lingkup I	1.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Lhokseumawe
			2.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Medan b) KPKNL Kisaran
			3.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Padang b) KPKNL Bukittinggi

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			4.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Jambi b) KPKNL Pangkal Pinang
			5.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bandar Lampung b) KPKNL Metro
			6.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Serang b) KPKNL Tangerang II
			7.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta I b) KPKNL Jakarta II c) KPKNL Jakarta III
			8.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bandung b) KPKNL Cirebon c) KPKNL Tasikmalaya
			9.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY a) KPKNL Semarang b) KPKNL Pekalongan c) KPKNL Tegal
			10.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Surabaya b) KPKNL Jember c) KPKNL Madiun

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			11.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Pontianak
			12.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Palangkaraya b) KPKNL Pangkalan Bun
			13.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Balikpapan b) KPKNL Tarakan
			14.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Denpasar b) KPKNL Kupang
			15.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Makassar
			16.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Manado b) KPKNL Ternate
			17.	Bimbingan Lelang Lingkup I Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Ambon b) KPKNL Sorong
9.	Seksi Bimbingan Lelang II	Pembinaan dan Pengoordinasian	1.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Aceh a) KPKNL Banda Aceh

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
		pada KPKNL Lingkup II	2.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Utara a) KPKNL Pematangsiantar b) KPKNL Padangsidimpuan
			3.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau a) KPKNL Pekanbaru b) KPKNL Batam c) KPKNL Dumai
			4.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung a) KPKNL Palembang b) KPKNL Lahat
			5.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu a) KPKNL Bengkulu
			6.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Banten a) KPKNL Tangerang I
			7.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN DKI Jakarta a) KPKNL Jakarta IV b) KPKNL Jakarta V
			8.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Barat a) KPKNL Bekasi b) KPKNL Bogor c) KPKNL Purwakarta

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS	
			9.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY a) KPKNL Surakarta b) KPKNL Yogyakarta c) KPKNL Purwokerto
			10.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Jawa Timur a) KPKNL Malang b) KPKNL Sidoarjo c) KPKNL Pamekasan
			11.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Barat a) KPKNL Singkawang
			12.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah a) KPKNL Banjarmasin
			13.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara a) KPKNL Samarinda b) KPKNL Bontang
			14.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara a) KPKNL Singaraja b) KPKNL Mataram c) KPKNL Bima
			15.	Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat a) KPKNL Mamuju b) KPKNL Pare-Pare c) KPKNL Palopo d) KPKNL Kendari

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO.	NAMA UNIT	LINGKUP	BEBAN TUGAS
			16. Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara a) KPKNL Gorontalo b) KPKNL Palu
			17. Bimbingan Lelang Lingkup II Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku a) KPKNL Jayapura b) KPKNL Biak

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian PBMNRTTU



Moh. Arif Rochman 